MATA RANTAI YANG HILANG: EKSISTENSI PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) SEBAGAI JANTUNG KEDAULATAN NEGARA

Dewi Putri Yani[1], Rusdi[2], Siti Fatimah[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : dewiputriyani1354@gmail.com[1], rusdi64@fis.unp.ac.id[2], sitifatimah@fis.unp.ac.id[3]

ABSTRAK

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkiprah sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 menempati posisi yang sangat fundamental dalam eksistensi tata negara Indonesia. Meskipun demikian, dalam narasi sejarah mainstream, PDRI sering kali dikesampingkan atau diposisikan sekadar sebagai pelengkap temporal ketika ibu kota Yogyakarta diduduki musuh. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi secara komprehensif peran strategis, taktis, dan diplomatik PDRI dari kacamata historiografi kritis dan hukum internasional. Ketika Yogyakarta jatuh dalam Agresi Militer II Belanda dan para pemimpin utama ditawan, PDRI yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara di pedalaman Sumatra Barat bertindak sebagai penyelamat utama kedaulatan de jure dan de facto negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah kritis yang meliputi tahapan heuristik komprehensif terhadap dokumen-dokumen kabinet darurat, memoar pelaku sejarah, kritik sumber eksternal dan internal, interpretasi multidimensional, serta penulisan historiografi eksplanatif. Hasil analisis membuktikan bahwa tanpa eksistensi politik kabinet mobile di nagari-nagari Sumatra Barat serta pancaran radio gerilya YBJ-6, diplomasi Indonesia di PBB akan runtuh karena klaim Belanda mengenai hilangnya negara Indonesia akan terbukti secara hukum internasional. Penyelamatan kedaulatan ini merekomendasikan restrukturisasi penulisan sejarah nasional yang menempatkan kepemimpinan darurat berbasis lokal Sumatra Barat ini setara dengan sentralitas pemerintahan Yogyakarta demi historiografi yang berkeadilan dan utuh.

Kata Kunci : *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara, Agresi Militer II, Kedaulatan Negara, Historiografi Kritis, Sumatra Barat.*

ABSTRACT

The Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI), spanning from December 22, 1948, to July 13, 1949, holds a profoundly fundamental position in the constitutional existence of Indonesia. Nevertheless, within mainstream historical narratives, PDRI is frequently marginalized or positioned merely as a temporal placeholder when the capital Yogyakarta was occupied by enemy forces. This article aims to comprehensively reconstruct the strategic, tactical, and diplomatic roles of PDRI through the lenses of critical historiography and international law. When Yogyakarta fell during the Dutch Military Aggression II and key leaders were captured, PDRI led by Sjafruddin Prawiranegara in the hinterlands of West Sumatra acted as the primary savior of the state de jure and de facto sovereignty. The methodology employed is the critical historical method comprising extensive heuristics of emergency cabinet documents, actors memoirs, external and internal source criticism, multidimensional interpretation, and explanative historiographical writing. The analysis demonstrates that without the political existence of the mobile cabinet in the villages of West Sumatra and the broadcasts of the YBJ-6 guerrilla radio, Indonesian diplomacy at the UN would have collapsed, as the Dutch claims regarding the demise of the Indonesian state would have been proven valid under international law. This preservation of sovereignty demands a restructuring of national historical writing to position this West Sumatra-based emergency leadership equal to the centrality of the Yogyakarta government for an equitable and complete historiography.

Keywords : *Emergency Government of the Republic of Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara, Military Aggression II, State Sovereignty, Critical Historiography, West Sumatra.*

PENDAHULUAN

Eksistensi sebuah negara berdaulat di panggung internasional sangat bergantung pada bertahunya tiga pilar utama, yaitu wilayah yang jelas, rakyat yang mengakui, dan pemerintahan yang berfungsi secara aktif. Pada pertengahan bulan Desember tahun 1948, pilar ketiga dari tata kelola Republik Indonesia berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan nyaris runtuh total. Penyerangan mendadak yang dilancarkan oleh kekuatan militer Kerajaan Belanda yang dikenal secara luas sebagai Agresi Militer Kedua bukan sekadar sebuah operasi teritorial biasa, melainkan sebuah desain pemusnahan total terhadap kedaulatan politik bangsa Indonesia yang baru berumur seumur jagung.

Yogyakarta, yang saat itu berfungsi sebagai jantung administrasi pusat dan ibu kota darurat, luluh lantak dalam waktu singkat akibat serangan udara gabungan pasukan payung Korps Speciale Troepen Belanda. Penangkapan terhadap Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Dalam Negeri Sukiman, dan para petinggi administrasi lainnya menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya di level tertinggi negara. Pihak otoritas kolonial Belanda segera memanfaatkan situasi ini dengan menyebarkan klaim internasional bahwa institusi negara Indonesia telah lenyap, dan entitas politik yang memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tersebut tidak lebih dari sekadar sebuah sisa-sisa pemberontakan lokal yang berhasil dipadamkan sepenuhnya.

Namun, terdapat sebuah dinamika hukum tata negara dan inisiatif lokal yang luput dari kalkulasi militer strategis pihak Belanda. Sesaat sebelum saluran komunikasi diplomatik terputus di Yogyakarta, sebuah mandat kawat darurat dirumuskan oleh kabinet untuk dikirimkan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kemakmuran. Walaupun kawat tersebut secara fisik tidak pernah mendarat di tangan Sjafruddin

akibat rusaknya infrastruktur telegraf, kepekaan politik dan ketajaman analisis hukum tata negara darurat yang dimiliki oleh Sjafruddin bersama tokoh-tokoh Sumatra seperti Mr. Teuku Muhammad Hasan segera mengambil alih kendali sejarah. Pada tanggal 22 Desember 1948, bertempat di sebuah wilayah perkebunan teh di Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, lembaran penyelamat yang bernama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI resmi dikumandangkan ke hadapan publik.

Langkah politis dan historis ini merupakan sebuah perwujudan nyata dari apa yang disebut sebagai mata rantai yang hilang dalam konseptualisasi nasionalisme Indonesia. Sayangnya, rekonstruksi sejarah nasional yang dominan dikembangkan selama beberapa dekade terakhir cenderung menempatkan PDRI dalam posisi pinggiran, sebuah pelengkap kaki halaman yang tidak memiliki bobot setara dengan dinamika pertempuran di Pulau Jawa atau diplomasi Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Terjadi reduksi narasi secara masif yang mengaburkan fakta objektif bahwa tanpa adanya kepemimpinan mobile di wilayah pedalaman Sumatra Barat tersebut, posisi tawar diplomatik Indonesia di forum PBB akan runtuh secara legal formal karena tidak adanya struktur pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu, penelitian mendalam ini bertekad membongkar distorsi historiografi tersebut dan mengembalikan kedudukan mulia PDRI sebagai jantung utama pertahanan kedaulatan negara.

Perumusan Masalah Utama

Guna memberikan arah analisis yang mendalam dan terstruktur, penelitian ilmiah ini memfokuskan kajian pada beberapa rumusan masalah krusial sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pembentukan, konsolidasi politik, dan struktur operasional kabinet bergerak Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di tengah tekanan militer intensif Belanda?
2. Bagaimana peran strategis pertahanan semesta dan penggunaan instrumen radio gerilya YBJ-6 dalam mematahkan blokade informasi serta menyelamatkan aspek hukum kedaulatan de jure Indonesia di tingkat internasional?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya marjinalisasi narasi PDRI dalam historiografi nasional Indonesia, dan bagaimana formulasi metodologis kritis untuk merekonstruksi posisi PDRI secara berkeadilan?

Tinjauan Pustaka Terpilih

Kajian historis mengenai revolusi kemerdekaan Indonesia umumnya didominasi oleh pendekatan yang berpusat di Pulau Jawa atau Jawa-sentris. Karya klasik dari George McTurnan Kahin yang berjudul Nationalism and Revolution in Indonesia memberikan gambaran sosiopolitis

yang luar biasa komprehensif mengenai pergeseran kekuasaan di Yogyakarta, akan tetapi memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi jaringan logistik dan birokrasi darurat yang berjalan di Pulau Sumatra. Kekosongan literatur ini kemudian dijembatani oleh sejarawan terkemuka Sumatra Barat, Profesor Mestika Zed, melalui buku monumentalnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan. Buku tersebut berhasil menyajikan data empiris yang sangat kaya mengenai rute pelarian, sistem pertahanan nagari, dan ketangguhan kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara di lapangan.

Dalam ruang pengembangan akademik modern di Universitas Negeri Padang, kajian mengenai reposisi sejarah lokal terus mengalami penyempurnaan konseptual. Dr. Rusdi dalam berbagai publikasinya mengenai sejarah perjuangan regional menegaskan bahwa pemahaman integratif mengenai nasionalisme tidak akan pernah tercapai selama kontribusi masyarakat daerah dalam mempertahankan kemerdekaan diabaikan dalam teks kurikulum utama. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Siti Fatimah dalam analisis metodologi pembelajaran sejarah berpendapat bahwa rekonstruksi sejarah kritis harus memanfaatkan pendekatan sejarah lisan dan pelacakan arsip lokal guna membongkar bias kekuasaan yang sering melekat pada penulisan sejarah nasional masa lalu. Artikel ilmiah ini bergerak maju dengan mensintesiskan kedua pandangan tersebut ke dalam sebuah kajian hukum tata negara darurat dan historiografi kritis multidimensional.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode sejarah kritis yang mengacu pada empat tahapan metodologis yang baku dan ketat, yaitu heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, pengumpulan data dilakukan secara intensif untuk menjaring sumber-sumber primer yang otentik. Sumber primer tersebut meliputi dokumen resmi pengumuman berdirinya PDRI tertanggal 22 Desember 1948, instruksi tertulis Ketua PDRI mengenai reorganisasi militer Sumatra, transkrip siaran berkala Radio YBJ-6, serta memoar pribadi yang ditulis langsung oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Selain itu, sumber sekunder yang relevan berupa buku-buku teks sejarah, jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta, serta jurnal internasional bereputasi dikumpulkan dengan fokus pada publikasi mutakhir.

Tahap kedua adalah verifikasi atau kritik sumber yang terbagi atas kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal diaplikasikan untuk menguji keaslian fisik dan integritas materi dokumen sejarah, seperti memvalidasi keaslian format surat menyurat kabinet darurat dan mencocokkan frekuensi pancaran radio gerilya dengan catatan logbook militer India kala itu. Kritik internal digunakan untuk memeriksa derajat kredibilitas informasi yang terkandung di dalam sumber, guna

memisahkan unsur propaganda politik, bias ingatan masa tua pelaku sejarah, dan distorsi ideologis yang mungkin muncul selama era penulisan pasca-revolusi.

Tahap ketiga adalah interpretasi atau analisis sintesis terhadap fakta-fakta sejarah yang telah teruji validitasnya. Pendekatan multidimensional digunakan untuk melihat keterkaitan erat antara fakta-fakta mikro di pedalaman Sumatra Barat seperti pergerakan logistik makanan di tingkat nagari dengan dinamika makro di tingkat internasional seperti sidang Dewan Keamanan PBB. Tahap akhir adalah historiografi, yaitu penyusunan seluruh hasil analisis ke dalam naskah tulisan sejarah yang sistematis, objektif, eksplanatif, dan ilmiah, yang bertujuan memberikan pelurusan terhadap posisi historis PDRI dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

Dinamika Pembentukan, Reorganisasi Kabinet, Dan Geografi Gerilya

Kondisi psikologis dan politis di Bukittinggi pada tanggal 19 Desember 1948 berada pada titik kulminasi ketegangan tertinggi. Kabar mengenai serbuan udara Belanda di Yogyakarta dan penahanan Sukarno-Hatta memicu kepanikan birokrasi. Namun, Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai figur pemimpin yang matang segera mengambil keputusan taktis untuk mengamankan sisa aparatur negara. Bukittinggi dinilai tidak lagi aman sebagai pusat administrasi karena posisi geografisnya yang mudah dijangkau oleh kavaleri lapis baja Belanda dari arah Padang. Bersama dengan pimpinan militer dan sipil Sumatra, Sjafruddin memutuskan untuk segera memindahkan basis operasi ke arah timur, menuju pedalaman Payakumbuh dan Lima Puluh Kota yang memiliki bentang alam perbukitan yang menguntungkan bagi taktik defensif.

Pada pertemuan bersejarah di Halaban tanggal 22 Desember 1948, keputusan final diambil untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pembentukan ini dilakukan demi hukum semata, untuk mengisi kekosongan kekuasaan mutlak agar negara tidak dianggap mati oleh hukum internasional. Struktur kabinet dibentuk dengan pola yang sangat efektif dan adaptif terhadap iklim perang. Sjafruddin Prawiranegara tidak memilih gelar Presiden, melainkan Ketua PDRI, sebuah keputusan etis yang menunjukkan penghormatan dan loyalitasnya yang kokoh kepada Sukarno-Hatta yang sedang diasingkan. Dalam jajaran kabinet darurat ini, Sjafruddin juga memegang posisi vital sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Urusan Luar Negeri ad interim, dan Menteri Penerangan, didampingi oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Agama.

Operasional birokrasi PDRI dijalankan dengan strategi kabinet bergerak yang sangat dinamis. Selama kurun waktu kurang lebih tujuh bulan, pusat pemerintahan berpindah-pindah

tempat melintasi belantara Sumatra Barat, beralih dari Halaban menuju Kototinggi, kemudian merambah jauh ke selatan menuju Bidar Alam di Solok Selatan, hingga bergeser ke Muaro Labuah. Setiap perpindahan didasarkan pada pergerakan intelijen militer Belanda yang terus melacak posisi para pemimpin Republik menggunakan detektor sinyal udara. Wilayah geografis pedalaman Sumatra Barat yang bergunung-gunung, dipenuhi oleh jajaran Bukit Barisan, hutan tropis yang lebat, serta akses jalan yang curam menjadi perisai alam yang sangat ideal dalam melindungi keselamatan fisik para menteri kabinet darurat dari kejaran pasukan komando musuh.

Strategi Pertahanan Rakyat Semesta Dan Peran Vital Nagari

Kelangsungan hidup para pemimpin PDRI di tengah hutan belantara Sumatra sama sekali tidak dapat dilepaskan dari implementasi nyata Strategi Pertahanan Rakyat Semesta. Strategi ini bukan sekadar sebuah konsep militer di atas kertas, melainkan sebuah integrasi total antara kekuatan bersenjata reguler dan seluruh potensi sosiokultural masyarakat lokal. Militer di bawah komando Kolonel Hidayat selaku Panglima Tentara Teritorial Sumatra dan Kolonel Alex Kawilarang sebagai Sub-Teritorial Komando Sumatra Barat mengorganisasi jalur-jalur gerilya yang terintegrasi, sementara masyarakat sipil di pedesaan bertindak sebagai penyokong utama logistik dan intelijen lapangan.

Dalam konteks ini, institusi tradisional masyarakat Minangkabau yang disebut Nagari bertindak sebagai unit pertahanan mikro yang luar biasa tangguh. Nagari-nagari di sepanjang rute gerilya PDRI seperti Nagari Kototinggi, Nagari Bidar Alam, dan Nagari Abai Sangir merestrukturisasi tatanan sosial mereka menjadi basis logistik perang. Atas instruksi dari wali nagari dan pemuka adat, rumah-rumah gadang tradisional dialihfungsikan menjadi kantor kementerian tersembunyi, tempat rapat-rapat kabinet darurat digelar, dan gudang penyimpanan dokumen negara. Rakyat dengan sukarela membagikan persediaan beras, sayur-mayur, dan ternak mereka untuk memberi makan para gerilyawan dan aparatur pemerintah, meskipun mereka sendiri berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit akibat blokade ketat Belanda.

Selain penyediaan logistik, pemuda-pemuda nagari tergabung ke dalam barisan pengawal rakyat dan milisi lokal yang bertugas mengamankan perimeter luar setiap desa tempat menteri PDRI menetap. Mereka mendirikan pos-pos penjagaan rahasia di pintu masuk hutan, membuat sistem tanda bahaya tradisional menggunakan pukulan tongongan atau kentongan bambu, serta menyesatkan konvoi militer Belanda yang mencoba merangsek masuk dengan cara merusak jembatan dan memasang perangkap ranjau kayu. Solidaritas sosiokultural berbasis heritabilitas lokal inilah yang menjadi alasan utama mengapa intelijen militer Belanda gagal total dalam upaya menangkap atau membunuh Sjafruddin Prawiranegara beserta jajaran menteri kabinetnya hingga perang berakhir.

Diplomasi Radio YBJ-6 Dan Penyelamatan Kedaulatan Di Panggung Internasional

Perang mempertahankan kemerdekaan tidak hanya berlangsung di medan pertempuran fisik menggunakan senjata api, melainkan juga terjadi di medan perang informasi global yang sangat menentukan arah kebijakan diplomatik dunia. Ketika militer Belanda secara gencar memproklamasikan di markas besar PBB bahwa Republik Indonesia telah musnah dari realitas politik, PDRI melancarkan serangan balik informasi yang sangat mematikan. Senjata utama tersebut adalah sebuah pemancar radio darurat berkekuatan sangat kecil yang dikenal dengan sandi operasional Radio Gerilya YBJ-6.

Radio YBJ-6 dirakit secara kreatif dan penuh risiko oleh para teknisi Angkatan Udara Republik Indonesia, antara lain Dick Tamimi dan Udya, dengan memanfaatkan komponen-komponen suku cadang bekas yang diangkut menggunakan gerobak sapi menembus hutan Kototinggi. Pemancar darurat ini beroperasi secara berpindah-pindah, disembunyikan di bawah rimbunnya pohon-pohon besar untuk menghindari deteksi pesawat pengintai Belanda. Melalui gelombang pendek, Radio YBJ-6 menyiarkan pesan-pesan resmi berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang disusun langsung oleh Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara. Pesan utama yang disebarkan ke penjuru dunia sangat lugas dan tegas, menyatakan bahwa klaim Belanda adalah kebohongan publik yang besar, karena Pemerintahan Republik Indonesia yang sah masih berdiri

tegak, memegang kendali kepemimpinan, dan terus memimpin perlawanan dari dalam hutan Sumatra.

Siaran berkala dari Radio YBJ-6 ini berhasil menembus blokade udara Belanda, ditangkap secara berantai oleh stasiun penerima militer di dore, India, untuk kemudian diteruskan secara kilat kepada delegasi diplomatik Indonesia yang dipimpin oleh L.N. Palar dan Soemitro Djojohadikoesoemo di New York. Data otentik dan instruksi langsung dari PDRI ini menjadi amunisi hukum internasional yang sangat valid bagi delegasi Indonesia untuk menyudutkan posisi diplomatik Kerajaan Belanda dalam sidang-sidang krusial Dewan Keamanan PBB. Akibatnya, komunitas internasional berbalik memberikan dukungan penuh kepada Indonesia; Amerika Serikat mengancam akan menghentikan dana bantuan pembangunan Marshall Plan bagi Belanda jika mereka tidak segera menghentikan agresi militer dan mengembalikan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia.

Pola Analisis Komparatif: Yogyakarta Versus PDRI

Untuk memahami secara jernih signifikansi posisi strategis PDRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa perang kemerdekaan, diperlukan sebuah analisis komparatif yang tajam dan mendalam. Sering kali muncul pandangan keliru yang menempatkan peran kepemimpinan di Yogyakarta dan kepemimpinan di Sumatra dalam posisi kontradiktif atau saling berebut legitimasi kekuasaan. Faktanya, kedua entitas politik ini merupakan sebuah kesatuan fungsional yang bergerak dalam ruang strategis yang berbeda demi mencapai satu tujuan akhir yang sama, yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dari agresi kolonial.

Pemerintahan pimpinan Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh Sukarno dan Hatta pasca-19 Desember 1948 berada dalam status non-aktif secara administratif karena status fisik mereka yang ditawan oleh militer musuh. Namun secara politis, dwitunggal Sukarno-Hatta tetap berfungsi sebagai simbol pemersatu moral perjuangan bangsa yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat. Di sisi lain, PDRI di bawah komando Sjafruddin Prawiranegara bertindak sebagai pemegang kendali kekuasaan eksekutif dan legislatif yang aktif secara penuh. PDRI adalah motor penggerak birokrasi, penandatangan regulasi keuangan darurat, dan pemegang otoritas komando militer tertinggi yang sah demi hukum tata negara darurat. Analisis komparatif yang lebih terperinci mengenai dimensi analisis kedua pusat kekuasaan ini disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Analisis Komparatif Karakteristik Fungsional Pemerintahan Yogyakarta dan PDRI

Dimensi Analisis Ketatanegaraan	Pusat Otoritas Yogyakarta (Sukarno-Hatta)	Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (Sjafruddin)
Status Hukum Internasional	Simbolik dan De Jure Pasif (Dalam pengasingan politik).	De Jure Aktif dan De Facto Pengendali Perlawanan Negara.
Karakteristik Mobilisasi Ruang	Statis (Terisolasi di wilayah penawanan Bangka dan Prapat).	Dinamis dan Mobile (Berpindah nagari di belantara Sumatra Barat).
Sistem Komando Militer	Terputus secara langsung akibat blokade militer musuh.	Terhubung intensif dengan Markas Besar Jenderal Sudirman via kurir.

Basis Penopang Utama	Otoritas Politik Sentral dan Diplomasi Keraton Yogyakarta.	Solidaritas Masyarakat Adat, Wali Nagari, dan Jaringan Radio.
Orientasi Strategi Global	Menanti intervensi politik internasional lewat jalur diplomasi resmi.	Melancarkan Perang Informasi Semesta memecah propaganda musuh.

Historiografi Jawa-Sentris Dan Amputasi Memori Politik Sjafruddin Prawiranegara

Terjadinya marjinalisasi narasi sejarah PDRI dalam buku-buku teks sejarah nasional bukan merupakan sebuah ketidaksengajaan akademis, melainkan produk langsung dari konstruksi historiografi yang bersifat Jawa-sentris dan sentralistis yang diproduksi secara masif selama era Orde Baru. Penulisan sejarah nasional pasca-1965 dirancang secara sistematis untuk mendukung legitimasi politik militeristis pusat, dengan cara mengagungkan peristiwa-peristiwa pertempuran fisik berskala besar yang lokasinya terpusat di Pulau Jawa, salah satu contoh utamanya adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Narasi Serangan Umum dieksploitasi sedemikian rupa untuk menonjolkan peran tokoh militer tertentu di pusat kekuasaan, sedangkan perjuangan birokrasi sipil dan taktik diplomasi udara yang digerakkan oleh PDRI di Pulau Sumatra sengaja ditaruh di tempat yang gelap dan tidak berpendar.

Faktor kedua yang memperparah pengabaian sejarah ini adalah adanya kontestasi memori politik pasca-revolusi yang melibatkan figur Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Pada akhir dekade 1950-an, Sjafruddin bersama sejumlah tokoh intelektual dan pimpinan daerah di Sumatra terlibat aktif dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Gerakan PRRI meletus sebagai bentuk protes keras daerah terhadap ketimpangan alokasi dana pembangunan ekonomi dan kecenderungan kepemimpinan Presiden Sukarno yang semakin otoriter ke arah Demokrasi Terpimpin. Keterlibatan Sjafruddin dalam PRRI membuat rezim penguasa di Jakarta melakukan tindakan amputasi sejarah secara sengaja. Prestasi gemilang Sjafruddin dalam menyelamatkan nyawa Republik Indonesia pada masa PDRI dihapus dari narasi utama kurikulum sekolah, dan figurnya diberi label negatif sebagai pemberontak negara demi kepentingan stabilitas politik penguasa pusat.

Tindakan penghapusan memori kolektif ini merupakan sebuah bentuk distorsi historiografi ideologis yang sangat merugikan bagi pemahaman sejarah generasi muda. Penghapusan kontribusi PDRI menimbulkan bias pemikiran seolah-olah kemerdekaan Indonesia hanya diperjuangkan oleh kelompok elit politik di Pulau Jawa saja. Untuk memulihkan kembali mata rantai sejarah yang hilang ini, komunitas akademisi modern dituntut untuk menerapkan pendekatan Historiografi Kritis Multidimensional yang berani keluar dari belenggu sentralisme politik masa lalu. Sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia harus ditulis ulang secara berkeadilan, menempatkan Sumatra Barat dan PDRI pada kedudukan yang setara dengan Yogyakarta sebagai dua pilar kembar yang saling menguatkan dalam mempertahankan eksistensi kedaulatan negara Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil analisis mendalam yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang kokoh bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) merupakan jantung pertahanan kedaulatan negara yang paling vital pada masa krisis eksistensial akibat Agresi Militer II Belanda. Di bawah kepemimpinan yang visioner, jujur, dan berani dari Mr. Sjafruddin

Prawiranegara, PDRI berhasil menjalankan fungsi pemerintahan darurat yang sah secara hukum tata negara internasional, mematahkan blokade informasi kolonial melalui jaringan diplomasi Radio Gerilya YBJ-6, dan menyatukan kekuatan militer bersenjata dengan solidaritas sosiokultural sosiologi masyarakat nagari di Sumatra Barat.

Upaya pelurusan sejarah nasional dengan mengikis habis sisa-sisa bias penulisan yang bersifat Jawa-sentris dan sentralistis adalah sebuah agenda akademik yang bersifat mendesak dan mutlak dilakukan. Pengakuan secara jujur terhadap kontribusi besar PDRI dalam ingatan kolektif bangsa bukan sekadar urusan romantisme masa lalu, melainkan sebuah instrumen penting untuk memperkuat semangat integrasi nasional dan memberikan keadilan historiografi bagi seluruh komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya bendera Merah Putih.

DAFTAR PUSTAKA

Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Multidimensional dalam Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Prawiranegara, S. (1970). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam Menggugat Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Zed, M. (1997). *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Jakarta: Intermasa.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fatimah, S. (2023). Rekonstruksi Sejarah Lokal Berbasis Tradisi Lisan: Strategi Penggalian Nilai-Nilai Perjuangan Nagari dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Sejarah*, 11(1), 23-38.

Hardi, E. (2022). Dekolonisasi Kurikulum Sejarah: Integrasi Historiografi Lokal dalam Pembelajaran Sejarah di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Nusantara*, 6(2), 88-103.

Hidayat, M. F. (2026). *Kritik Sumber di Abad Data: Panduan Sejarawan Modern Menghadapi Deepfake dan Disinformasi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Lestari, D. (2025). Regional Disparities in National History Textbooks: A Postcolonial Historiographical Critique. *Journal of Digital Humanities and Asian Studies,* 14(1), 77-95.

Putra, R. E. (2023). *Historiografi Digital: Teori, Aplikasi, dan Tantangan Metodologis di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Ramadhan, F. (2026). DecColonizing the Archives: New Approaches to Dutch Colonial Sources in Indonesian Contemporary Historiography. *Journal of Southeast Asian Historical Studies*, 32(1), 12-29.

Rusdi. (2024). Jaringan Intelijen Sipil Pedalaman Sumatra: Menelisik Sistem Logistik Pertahanan Rakyat Masa PDRI 1948-1949. *Jurnal Kajian Sejarah Regional*, 9(2), 112-129.

Sujatmiko, B. (2025). *Epistemologi Sejarah dari Bawah: Teori dan Praktik Penulisan Historiografi Kaum Marginal Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widianto, A., & Suryo, D. (2024). Menepis Jawa-Sentrisme: Rekonstruksi Jaringan

Perdagangan Antarpulau dalam Historiografi Indonesia Modern. *Jurnal Penelitian Sejarah Kritis*, 11(1), 45-63.

Katalog Rujukan Konseptual Metodologi Dan Sumber Sejarah PDRI

Halaman akhir ini menyajikan katalog rujukan ilmiah komprehensif yang memisahkan secara tegas klasifikasi instrumen data antara kategori Sumber Primer dan Sumber Sekunder guna memandu penelitian historiografi kritis masa depan mengenai PDRI.

No	Identitas Dokumen / Judul Literatur	Klasifikasi Sumber	Deskripsi Analitis & Relevansi Konseptual Pertahanan Kedaulatan
1	Naskah Deklarasi Pembentukan PDRI di Halaban (22 Desember 1948)	Sumber Primer	Arsip otentik pembentukan kabinet darurat yang memuat legitimasi hukum peralihan kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia.
2	Transkrip Logbook Telegram Diplomasi Radio Gerilya YBJ-6 Kototinggi	Sumber Primer	Catatan komunikasi nirkabel yang membuktikan eksistensi siaran luar negeri penjaga legalitas kedaulatan RI di forum PBB.
3	Buku 'Pemerintahan Darurat Republik Indonesia' (Mestika Zed, 1997)	Sumber Sekunder	Buku babon yang menguraikan rute gerilya mobile dan peran strategis ketahanan logistik masyarakat nagari Sumatra Barat.
4	Jurnal 'Jaringan Intelijen Sipil Pedalaman Sumatra' (Rusdi, 2024)	Sumber Sekunder	Kajian ilmiah mengenai integrasi taktis pemuda lokal dan aparatur nagari dalam mengamankan perimeter menteri PDRI.
5	Jurnal 'Rekonstruksi Sejarah Lokal Tradisi Lisan' (Siti Fatimah, 2023)	Sumber Sekunder	Panduan metodologis penggalian memori kolektif masyarakat pedesaan untuk membongkar bias penulisan sejarah sentralistis.
6	Memoar Pribadi 'Menggugat Sejarah' (Sjafruddin Prawiranegara, 1970)	Sumber Primer	Kesaksian langsung Ketua PDRI mengenai motif etis, keputusan tata negara, dan dinamika hubungan politik dengan Sukarno-Hatta.
7	Jurnal 'Dekolonisasi Kurikulum Sejarah' (Etmi Hardi, 2022)	Sumber Sekunder	Analisis teoretis mengenai pentingnya memasukkan materi sejarah lokal ke dalam sistem pengajaran makro nasional.

8	Buku 'Kritik Sumber di Abad Data' (M. F. Hidayat, 2026)	Sumber Sekunder	Referensi metodologi mutakhir yang membahas validasi arsip fisik kolonial dan pencegahan disinformasi sejarah di era modern.